



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 5 /HK.03.1 /5315/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
Sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022.

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Barat ...

Barat Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/
Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 2 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

ttd.

ROBERTUS V.DIN



LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR 5 /HK.03.1 /5315/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
Pengarah				
1	Robertus V. Din	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2	Krispianus Bhedā	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
3	Ponsianus Mato	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4	Muhamad Ilham	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
5	Heribertus Panis	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
Pelaksana				
1	Bonafantura Yosman	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya / berjenjang pada akhir tahun; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; - Menjadi agen perubahan.
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT				
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Benediktus Hibur	Plt. Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
2	Benediktus Bagung	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3	Sifa Nurfadilah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
SUB BAGIAN HUKUM				
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2	Benediktus Hibur	Plt. Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
3	Novitasari Putri P. Renda Sogara	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM				
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Benediktus Bagung	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Eugenia T. Da Gomez	Staf Sub Bagian SDM	Anggota	
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA				
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Yosefia Mujur	Pt. Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
2	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
3	Maria E. Rusmayanti	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM				
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	Benediktus Bagung	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi;
				Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
3	Eugenia T. Da Gomez	Staf Sub Bagian SDM	Anggota	Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI TIM PENGAWASAN				
1	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat:
2	Yosefia Mujur	Plt. Sub Bagian Program dan Data	Asesor	-Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
3	Novitasari Putri P. Renda Sogara	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Yosefia Mujur	Plt. Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2	Benediktus Bagung	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
3	Eugenia T. Da Gomez	Staf Sub Bagian SDM	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Benediktus Hibur	Plt. Sub Bagian Teknis dan Hupmas.	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2	Yosefia Mujur	Plt. Sub Bagian Program dan Data	Asesor	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3	Sifa Nurfadilah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas.	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Benediktus Bagung	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membuat rencana aksi dan program program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Yosefia Mujur	Plt. Sub Bagian Program dan Data	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4	Benediktus Hibur	Plt. Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di : Labuan Bajo
 Pada tanggal : 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN



RENCANA AKSI KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETE RANG AN		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Manajemen perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.		√	√												
			2. Pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2. Kegiatan Kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.			√	√											
			3. Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rencana aksi Tahunan RB dan Rencana aksi Perubahan di lingkungan sekretariat KPU	3. Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rencana aksi Tahunan RB dan Rencana aksi Perubahan di		√	√	√											
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal;			√	√	√										
			2. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja	2. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN			√	√	√										
			3. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di unit kerja/satuan kerja	3. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan unit/satuan kerja;		√	√	√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR K	HASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETE RANG AN
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan	1. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	1. Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja	1.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	2. Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	2.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Pengelolaan JDIH	3. Pembangunan JDIH Satuan Kerja	1.	Updatenya data JDIH Satuan Kerja			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan	1.	Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi												√	√
		2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. 2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	1. 2.	SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. Struktur Organisasi unit/satuan kerja			√	√									
4	Penataan Tata Laksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan Unit/Satuan Kerja	1. Penyusunan SOP di lingkungan unit/satuan	1.	SOP sudah dilegalkan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	2. Pengelolaan PPID dan e- PPID di lingkungan satuan kerja;	2.	Meningkatnya kepuasan layanan PID;			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan unit/satuan kerja	3. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: 1) Aplikasi Manajemen Kepegawaian 2).Aplikasi Perencanaan 3) Aplikasi Keuangan 4) Aplikasi Pengadaan	3.	1). Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian 2).Terisnya data aplikasi Manajemen Perencanaan 3).Terisnya data aplikasi Manajemen Keuangan 4). % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR K	HASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETE RANG AN
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4 Penerapan sistem kearsipan yang handal	4 Penerapan sistem arsip	4	Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit/satuan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1 Pembangunan Sistem Merit (kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi)	1 Perigisian Sistem Informasi Kepegawaian	1	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	2	1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 2) Jumlah Pelanggaran tahun ini 3) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3. Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	3	Data Promosi dan Data Peserta Assessment		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	1	Renstra satuan kerja						√					√		
			2 Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	2	Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja												√	
			3 Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	3	Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu													√
		2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2	Permutakhirian data kinerja di aplikasi E- Lapkin	2	Terisinya aplikasi e- Lapkin												√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR & HASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETE RANG AN	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	Pengawasan	1 Pelaksanaan Gratifikasi KPU pengendalian	1 Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	1 Adanya UPG unit/satuan kerja di lingkungan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	2 Laporan pengendalian gratifikasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2 Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	1 Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan	1 Adanya tim SPIP pada satuan kerja			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pelaksanaan SPIP : 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	2 Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	3 Pelaporan Buku Kendali tepat waktu			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja;	1 Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		4 Peningkatan Integritas Individu	1 Penyampaian LHKPN	1 100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan Kerja			√	√	√	√								
			2 Penyampaian LHKASN	2 100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja			√	√	√	√								

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR & RHASILAN	PELAKSANAAN (BULANAN)												KETE RANG AN	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	Pelayanan Publik	1 Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan unit/satuan kerja	1 Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan : 1) Kecepatan Waktu Penyelesaian 2) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3) Kompetensi Pelaksana	1 1) Adanya SOP Pelayanan 2) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal 3) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi			√	√	√	√	√	√						
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu						√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	3 Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	3 Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan					√				√					√

Ditetapkan di : Labuan Bajo
 Pada tanggal : 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN

